

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Dengan berakhirnya rangkaian pembahasan dalam Tulisan ini, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Tampan telah dilaksanakan dengan baik dan benar melalui berbagai bentuk, yaitu : Sosialisasi, implementasi penerapan biaya pelayanan nikah dengan ketat, membangun integritas dan supervisi kepada Pegawai KUA dan penghulu baik secara internal maupun eksternal.
2. Pemberlakuan PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Tampan telah memunculkan beberapa manfaat positif atau fungsi, yang diantaranya adalah : Fungsi perlindungan hukum, Fungsi pembangun citra positif KUA, Fungsi keadilan dan Fungsi sinkronisasi.
3. Kendala dan problematika dalam penerapan PP nomor 48 tahun 2014 telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 adalah : Calon Pengantin mengeluhkan Lama antrian setor tunai biaya nikah ke Bank (mestinya bisa via transfer atau e-banking), kesulitan keuangan operasional penghulu, kesulitan keuangan operasional KUA, tidak sepenuhnya menghilangkan citra buruk KUA, belum meng-cover seluruh kegiatan pelayanan KUA dan mahal biaya pelaksanaan kursus pra nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam hal efektifitas pemberlakuan PP tersebut terbagi dalam dua aspek. Pertama, dalam spek penciptaan *clean gavernment* melalui penegakan aturan biaya pelayanan nikah, telah berjalan efektif. Sedangkan Kedua, dalam aspek *image building* (pembangunan image positif) belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih menyisakan peluang terbentuknya image buruk bagi KUA. Hal demikian terjadi karena belum komprehensifnya peraturan, belum sempurnanya kebijakan dalam tata kelola keuangan PNBP dan masih terlibatnya pihak ketiga dalam pelayanan nikah di KUA.

B. Saran-saran (Rekomendasi)

Selanjutnya untuk melengkapi bahasan pada karya tulis ini dapat penulis sampaikan saran-saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur lengkap seluruh aspek biaya pelayanan KUA, yang pada kenyataannya tidak hanya mengurus pelayanan nikah semata. Namun diperlukan rincian jenis pelayanan non bedolan, seperti pelayanan akta ikrar wakaf, pelayanan duplikat buku nikah, pelayanan legalisir buku nikah, pelayanan legalisasi proposal, pelayanan rekomendasi, surat keterangan dan lain-lain. Sehingga jelas legalitasnya dalam perspektif hukum, apakah harus membayar atau gratis.
2. Jika pelayanan di KUA selain nikah bedolan ditetapkan gratis, maka harus dialokasikan melalui anggaran resmi dalam DIPA Kementerian Agama khususnya untuk pelayanan yang membutuhkan pembiayaan rasional,. Misalnya untuk pelayanan akta ikrar wakaf, yang meliputi biaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecekan lokasi, verifikasi faktual di pemerintah desa dan lain-lain dibebankan pada anggaran DIPA Kementerian Agama.

3. Perlu dibangun sistem pengelolaan dana PNBP NR yang sederhana, cepat, dan fleksibel namun tetap dalam tingkat akuntabilitas yang tinggi. Sehingga pencairan dapat dilakukan cepat dan lancar (tidak tertunda terlalu lama, dan tidak mengganggu kinerja di KUA).

